

Pengaruh Inflasi Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Sarah Desnita Manihuruk *¹
Joko Suhariantio²

^{1,2} Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia
*e-mail: sarahdesnita@gmail.com ¹, djoko@unimed.ac.id ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Gini Ratio di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi EViews. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti peningkatan inflasi cenderung meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan. Sementara itu, PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun secara simultan, inflasi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi serta kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di daerah.

Kata kunci : Inflasi, PDRB, Ketimpangan Pendapatan, Gini Ratio, Sumatera Utara

Abstract

This study aims to analyze the effect of inflation and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on income inequality as measured by the Gini Ratio in North Sumatra Province during the period 2010–2024. This research uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis. The data used are time series data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). Data processing was conducted using EViews software. Before performing regression analysis, classical assumption tests were conducted including normality, autocorrelation, heteroscedasticity, and multicollinearity tests. The results show that partially inflation has a positive effect on income inequality, indicating that an increase in inflation tends to increase income inequality. Meanwhile, GRDP does not have a significant effect on income inequality. However, simultaneously inflation and GRDP have a significant effect on income inequality in North Sumatra Province. These findings suggest that inflation control and more inclusive economic development policies are needed to reduce income inequality in the region.

Keywords : Inflation, GRDP, Income Inequality, Gini Ratio, North Sumatra

PENDAHULUAN

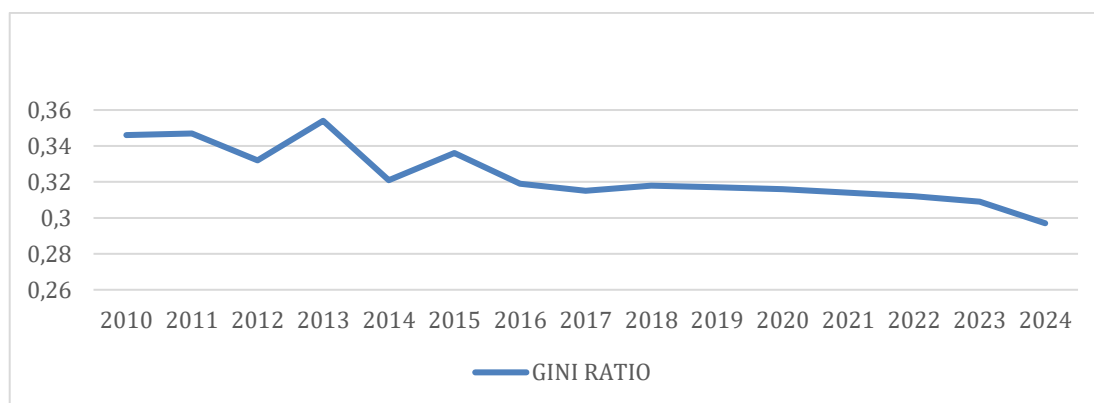
Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali belum mampu menjamin distribusi pendapatan yang merata di antara kelompok masyarakat. Dalam konteks pembangunan regional di Indonesia, ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan besar, termasuk di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki struktur ekonomi dan karakteristik sosial yang heterogen. Ketimpangan pendapatan umumnya diukur menggunakan indikator Gini Ratio, yang mencerminkan sejauh mana distribusi pendapatan menyimpang dari kondisi pemerataan sempurna. Nilai Gini Ratio yang tinggi menunjukkan adanya konsentrasi pendapatan pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat lainnya menerima bagian pendapatan yang relatif kecil. Kondisi ini dapat menghambat mobilitas sosial, memperbesar kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Secara teoritis, ketimpangan pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor institusional dan struktural. Menurut Edward L. Glaeser (2006), ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi di mana pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata,

yang ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, serta berkaitan dengan sistem pemerintahan yang tidak menghargai property rights dan praktik pemerintahan yang tidak efektif. Teori ini menekankan bahwa kualitas institusi dan struktur sosial memiliki peran penting dalam menentukan pola distribusi pendapatan. Dalam masyarakat yang heterogen dan dengan tata kelola yang kurang baik, distribusi sumber daya cenderung tidak merata sehingga memperbesar ketimpangan.

Sejalan dengan itu, Tulus Tambunan (2001) menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi masalah ketimpangan pendapatan yang terjadi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, serta berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan di negara berkembang umumnya muncul sebagai konsekuensi dari proses pembangunan yang belum merata antarwilayah maupun antarsektor ekonomi. Selanjutnya, menurut Michael P. Todaro (2003), ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan yang mencolok dalam struktur sosial ekonomi. Lebih lanjut, Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2006) menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

1. menyebabkan inefisiensi ekonomi karena alokasi sumber daya tidak optimal;
2. melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas dalam masyarakat; serta
3. dianggap tidak adil secara moral dan sosial. Dengan demikian, ketimpangan yang tinggi bukan hanya persoalan distribusi ekonomi, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas pembangunan jangka Panjang.

Sejalan dengan pandangan tersebut, tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah dapat diukur secara kuantitatif melalui indikator Gini Ratio. Indikator ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana distribusi pendapatan di antara kelompok masyarakat terjadi secara merata atau timpang. Ketimpangan Pendapatan di Indonesia dapat dilihat dari angka Gini Ratio. Gambar 1 menunjukkan bahwa Ketimpangan Pendapatan Indonesia dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2024 mengalami ketidakstabilan (naik turun).



Gambar 1.1. Perkembangan Ketipangan Pendapatan (Gini Ratio) di Sumatera Utara Tahun 2010 – 2024.

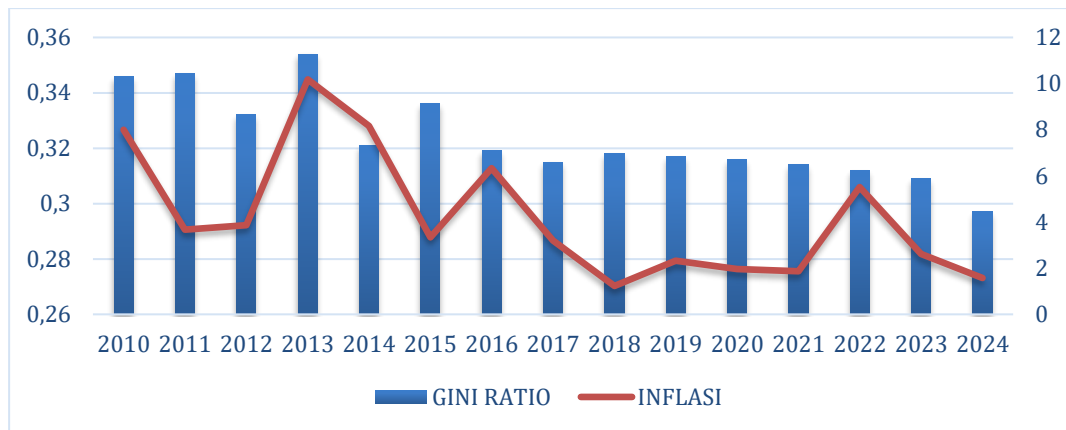
Berdasarkan Gambar 1.1. data di atas, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio pada tahun 2010 berada di kisaran 0,34–0,35. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berada pada kategori sedang. Pada tahun 2011, nilai Gini Ratio relatif stabil dan sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan belum adanya perubahan signifikan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Memasuki tahun 2012, terjadi penurunan nilai Gini Ratio hingga berada di kisaran 0,33. Penurunan ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan dalam pemerataan pendapatan. Namun, pada tahun 2013 terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai titik tertinggi selama periode pengamatan, yaitu sekitar 0,35. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya ketimpangan pendapatan, di mana kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah semakin melebar.

Pada tahun 2014, Gini Ratio mengalami penurunan tajam hingga sekitar 0,32. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2015 kembali mengalami kenaikan ke kisaran 0,33–0,34, yang berarti ketimpangan kembali meningkat meskipun tidak setinggi tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2016 dan 2017 terlihat tren penurunan yang konsisten, dengan nilai Gini Ratio berada di kisaran 0,31–0,32. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam distribusi pendapatan. Tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan, namun relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode 2019 hingga 2022, Gini Ratio menunjukkan tren menurun secara perlahan namun konsisten, dari kisaran sekitar 0,316 hingga mendekati 0,31. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung membaik secara gradual dalam beberapa tahun terakhir periode tersebut. Tahun 2023 menunjukkan penurunan yang lebih jelas hingga berada di sekitar 0,309, dan pada tahun 2024 kembali turun cukup signifikan hingga mendekati 0,297. Nilai ini merupakan angka terendah selama periode 2010–2024. Penurunan hingga di bawah 0,30 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih berada dalam kategori ketimpangan sedang menuju rendah. Secara keseluruhan, berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan selama periode 2010–2024 mengalami fluktuasi pada awal periode (2010–2015) dengan puncak ketimpangan terjadi pada tahun 2013. Setelah itu, tren cenderung menurun secara bertahap hingga mencapai titik terendah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan distribusi pendapatan dalam jangka panjang, meskipun prosesnya berlangsung secara bertahap dan tidak sepenuhnya stabil pada setiap tahunnya.

Salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan adalah inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proposional dengan pertambahan produksi barang secara umum (Irma Adelman dan Chynthia Taft Morris dalam Arsyad, 2004). Lonjakan inflasi yang terlalu tinggi dan tidak diimbangi oleh pemerataan ekonomi akan memperluas kemiskinan, meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan kesejahteraan dan meningkatkan ketimpangan pendapatan (Wahyuni & Andriyani, 2022).

Inflasi dapat memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) karena dampaknya tidak dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat berpendapatan rendah lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok karena sebagian besar penghasilannya digunakan untuk konsumsi. Menurut Nasution & Sumanjaya (2017), inflasi adalah kecenderungan permintaan agregat meningkat lebih dari penawaran agregat, yang menyebabkan harga komoditas lebih tinggi. Sedangkan Menurut Boediono (1995) inflasi diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan berlangsung terus-menerus. Sebaliknya, kelompok berpendapatan tinggi memiliki akses terhadap aset dan instrumen keuangan yang cenderung terlindungi dari inflasi. Oleh karena itu, ketika inflasi tinggi, daya beli kelompok bawah menurun lebih tajam, yang menyebabkan kesenjangan pendapatan melebar dan Gini Ratio meningkat. Dengan demikian, inflasi dapat dipahami sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan daya beli uang menurun karena jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak sebanding dengan ketersediaan barang dan jasa di pasar. Akibatnya, nilai uang menjadi relatif lebih rendah dibandingkan nilai barang dan jasa, sehingga harga-harga terus mengalami kenaikan secara umum dan terus-menerus.

Berdasarkan narasi di atas mengindikasikan bahwa naiknya Inflasi tersebut sangat mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Hal ini bisa diamati pada Gambar 1.2. berikut:



Gambar 1.2. Perkembangan Inflasi di Sumatera Utara Tahun 2010-2024.

Berdasarkan Gambar 1.2. grafik di atas, perkembangan inflasi di Sumatera Utara selama periode 2010 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada awal periode, yaitu tahun 2010, tingkat inflasi tercatat cukup tinggi, mendekati angka 8%. Namun, pada tahun berikutnya, 2011, terjadi penurunan tajam di mana inflasi turun ke kisaran sekitar 3,5%. Setelah itu, pada tahun 2012, inflasi kembali meningkat sedikit dan berada di kisaran 4%, kemudian melonjak cukup signifikan pada tahun 2013 dengan puncaknya mencapai lebih dari 10%. Kenaikan inflasi yang tinggi pada tahun tersebut dapat menunjukkan tekanan harga yang kuat di pasar, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada daya beli masyarakat. Setelah mencapai puncak pada 2013, inflasi mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2014, turun ke kisaran 6%, dan kemudian terus menurun hingga mencapai titik terendahnya sekitar 2% pada tahun 2018. Periode penurunan ini menunjukkan adanya pengendalian inflasi yang cukup efektif selama beberapa tahun, yang mungkin didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang stabil.

Memasuki tahun 2019 hingga 2021, inflasi relatif stabil berada pada kisaran 2% hingga 3%, menandakan kondisi ekonomi yang relatif terkendali meskipun terdapat tantangan global seperti pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2022, inflasi kembali mengalami lonjakan signifikan, mencapai hampir 7%, yang dapat disebabkan oleh tekanan harga global akibat gangguan rantai pasok, kenaikan harga energi, atau faktor domestik lainnya. Setelah lonjakan tersebut, inflasi kembali menurun pada tahun 2023 dan diperkirakan terus menurun hingga sekitar 2% pada tahun 2024, menunjukkan tanda-tanda stabilisasi harga yang kembali membaik. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa inflasi di Sumatera Utara selama 15 tahun terakhir mengalami beberapa periode kenaikan dan penurunan yang tajam, namun dengan tren jangka panjang yang cenderung mengarah pada pengendalian inflasi di tingkat yang lebih rendah pada akhir periode pengamatan. Perkembangan ini sangat penting untuk dianalisis karena inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat berdampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain permasalahan kesenjangan data dengan arah teori adapun terdapat permasalahannya lainnya, yakni *gap research* antara inflasi dengan ketimpangan pendapatan (gini ratio). Penelitian yang mengkaji inflasi terhadap ketimpangan pendapatan (gini ratio) sudah ada dilakukan sebelumnya, Law & Soon (2020) menemukan bahwa inflasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di banyak negara, terutama di negara-negara Asia berkembang. Namun hal ini bertentangan dengan Coibion et al. (2017), dan Furceri et al. (2018) menunjukkan bukti bahwa inflasi tidak selalu meningkatkan ketimpangan atau bisa tidak signifikan dalam pengaruhnya. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang mungkin memoderasi atau memediasi hubungan antara inflasi dan ketimpangan pendapatan. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa kondisi struktural ekonomi, seperti tingkat pembangunan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, pasar tenaga kerja, serta akses terhadap pendidikan dan layanan sosial, dapat memengaruhi sensitivitas ketimpangan terhadap inflasi. Selain itu, karakteristik demografis dan sosial, seperti distribusi usia, tingkat urbanisasi, dan akses terhadap teknologi juga dapat berperan dalam menentukan sejauh mana inflasi

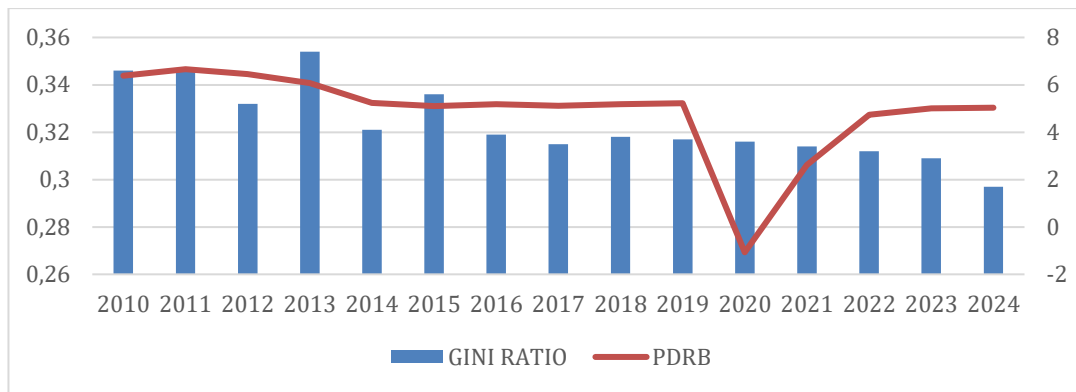
berdampak pada ketimpangan.

Selain inflasi, faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah. PDRB menunjukkan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam wilayah tertentu selama periode tertentu, baik dalam nilai nominal maupun riil. Besarnya PDRB mencerminkan kapasitas produksi daerah dan menjadi salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi regional. PDRB merupakan nilai bersih dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (Sukmaraga, 2011). PDRB memiliki pengaruh terhadap tingkat kesempatan kerja, dengan asumsi bahwa peningkatan PDRB akan meningkatkan total nilai tambah barang dan jasa di seluruh unit ekonomi wilayah tersebut. Kenaikan jumlah barang dan jasa ini kemudian mendorong permintaan terhadap tenaga kerja, sehingga jumlah pekerja yang dibutuhkan turut meningkat. Selain itu, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Secara konseptual, peningkatan PDRB mencerminkan meningkatnya nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi di suatu wilayah. Kenaikan output tersebut umumnya diikuti oleh peningkatan permintaan tenaga kerja, sehingga kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat turut meningkat. Oleh karena itu, pertumbuhan PDRB sering diasumsikan berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PDRB atas dasar harga konstan secara khusus digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga. Namun demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak selalu bersifat linier. Secara teoritis, hipotesis Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena manfaat pertumbuhan ekonomi lebih dahulu dinikmati oleh kelompok tertentu, terutama pemilik modal dan tenaga kerja terampil. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya pemerataan akses pendidikan serta kesempatan kerja, ketimpangan tersebut berpotensi menurun.

Pertumbuhan PDRB yang tinggi umumnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Hal ini sejalan dengan Nilasari, A., & Febrianti, R. (2023). menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Gini ratio). Artinya, semakin meningkat PDRB di wilayah tersebut, ketimpangan pendapatan juga cenderung meningkat signifikan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti pemerataan pendapatan. Dalam banyak kasus, terdapat fenomena di mana pertumbuhan PDRB lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, PDRB sering dijadikan salah satu faktor penting dalam menganalisis ketimpangan pendapatan (Gini ratio). yang berarti peningkatan PDRB di suatu wilayah dapat diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu disertai dengan distribusi pendapatan yang merata. Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi sering kali terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu atau wilayah tertentu sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks wilayah penelitian, dinamika PDRB menjadi penting untuk dianalisis guna melihat bagaimana pola pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode penelitian. Perkembangan PDRB yang berfluktuasi atau yang tumbuh secara tidak merata antar sektor dapat memberikan indikasi awal mengenai potensi terjadinya ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, analisis terhadap tren PDRB diperlukan sebagai dasar untuk memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan narasi di atas dapat kita lihat data yang diperoleh setiap tahunnya dari produk domestik regional bruto tahun 2010 hingga 2024. Hal ini bisa dilihat dari Gambar 1.3 berikut:



Gambar 1.2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Sumatra Utara Tahun 2010-2024.

Perkembangan PDRB selama periode 2010–2024 menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dalam jangka panjang, namun mengalami satu guncangan besar yang sangat signifikan pada tahun 2020. Pada periode 2010–2013, pertumbuhan ekonomi berada dalam fase yang relatif kuat. Tahun 2010 mencatat pertumbuhan sekitar 5,8%, kemudian meningkat dan mencapai puncaknya pada 2011 di kisaran 6%. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang ekspansif, didorong oleh konsumsi, investasi, maupun perdagangan yang masih tumbuh baik. Namun, setelah 2011, pertumbuhan mulai melambat secara bertahap hingga berada di sekitar 5,5% pada 2013. Meskipun terjadi penurunan, laju ini masih tergolong tinggi dan mencerminkan kondisi ekonomi yang tetap sehat.

Memasuki periode 2014–2019, pertumbuhan PDRB menunjukkan kecenderungan lebih moderat dan stabil di kisaran 4,9–5,0%. Tahun 2014 menjadi titik awal perlambatan yang lebih terlihat, dengan pertumbuhan turun ke sekitar 5%, lalu bergerak relatif datar hingga 2019. Pada fase ini, tidak terjadi lonjakan maupun penurunan tajam, yang mengindikasikan bahwa perekonomian berada dalam kondisi steady growth atau pertumbuhan stabil. Stabilitas ini penting karena menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi, dan investasi, meskipun tidak sekuat periode awal dekade.

Perubahan paling drastis terjadi pada tahun 2020, ketika PDRB mengalami kontraksi hingga sekitar -1%. Ini merupakan penurunan terdalam sepanjang periode pengamatan. Kontraksi tersebut mencerminkan adanya gangguan besar terhadap aktivitas ekonomi, yang kemungkinan besar dipicu oleh pandemi COVID-19. Pembatasan mobilitas, penurunan daya beli masyarakat, gangguan rantai pasok, serta perlambatan sektor usaha menyebabkan pertumbuhan ekonomi tertekan hingga masuk zona negatif.

Namun demikian, setelah kontraksi tajam tersebut, terlihat adanya proses pemulihan yang cukup cepat. Pada 2021, pertumbuhan kembali positif di sekitar 3%, menandakan awal rebound ekonomi. Tahun 2022 menunjukkan percepatan pemulihan dengan pertumbuhan mendekati 5%, hampir kembali ke tingkat sebelum pandemi. Tren ini berlanjut pada 2023 dan 2024, di mana pertumbuhan stabil kembali di kisaran 5%. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi telah kembali pulih dan aktivitas produksi serta konsumsi masyarakat telah normal kembali.

Secara keseluruhan, pola PDRB 2010–2024 memperlihatkan tiga fase utama: fase pertumbuhan kuat (2010–2013), fase stabil moderat (2014–2019), fase kontraksi tajam (2020), dan fase pemulihan serta normalisasi (2021–2024). Meskipun sempat mengalami tekanan berat, perekonomian menunjukkan resiliensi yang cukup baik dengan mampu kembali ke jalur pertumbuhan jangka menengah di sekitar 5%. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan ketimpangan pendapatan tidak selalu bersifat seragam, melainkan bergantung pada struktur sektor ekonomi yang dominan dan bagaimana pertumbuhan tersebut terdistribusi. Penelitian Sutiono & Syafitri (2018) menemukan bahwa PDRB sektor pertanian tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Kondisi ini disebabkan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan sektor pertanian. Sebagian besar petani menjual hasil produksi dalam bentuk bahan baku tanpa proses pengolahan lebih lanjut, sehingga keuntungan yang diperoleh relatif kecil. Nilai tambah justru lebih banyak dinikmati oleh

pedagang dan pengumpul hasil pertanian. Selain itu, terjadinya alih fungsi lahan pertanian serta penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian menyebabkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian semakin menurun, sehingga dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan menjadi tidak signifikan.

Berbeda dengan sektor pertanian, studi Udhar (2020) menunjukkan bahwa sektor sekunder atau industri berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan. Artinya, semakin berkembang sektor industri, semakin menurun tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor industri menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sutiono & Syafitri (2018) yang menyatakan bahwa PDRB sektor industri berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Karakteristik sektor industri yang cenderung padat karya memungkinkan penyerapan tenaga kerja lebih luas serta memberikan upah yang relatif lebih baik, terutama dengan adanya kebijakan upah minimum regional.

Namun demikian, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang sama. Istiqamah et al. (2018) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi justru berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di berbagai provinsi di Indonesia. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum tentu mampu menurunkan ketimpangan. Kondisi ini dapat terjadi apabila hasil pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu dan tidak didistribusikan secara merata. Selain itu, jika pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan kebijakan pemerataan, peningkatan belanja daerah untuk penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, maka ketimpangan pendapatan cenderung tetap tinggi atau bahkan meningkat.

Di sisi lain, penelitian Sylviarani & Hasmarini (2017) serta Dwiputra (2018) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat dan produktivitas daerah membaik, maka distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menjadi instrumen pengurangan ketimpangan apabila disertai dengan peningkatan kesempatan kerja, pemerataan akses ekonomi, dan kebijakan distribusi yang tepat.

Secara keseluruhan, perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak PDRB terhadap ketimpangan pendapatan sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, karakteristik sektor yang tumbuh, serta kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan hasil pembangunan. Pertumbuhan yang bertumpu pada sektor padat karya dan bernilai tambah tinggi cenderung mampu menurunkan ketimpangan, sedangkan pertumbuhan yang tidak inklusif justru berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan ketimpangan pendapatan masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, khususnya yang didorong oleh sektor industri, mampu menurunkan ketimpangan melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Namun, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan karena hasil pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan adanya inkonsistensi hasil penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Selain itu, secara empiris pertumbuhan PDRB tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Dalam beberapa periode, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum tentu bersifat inklusif, tergantung pada sektor mana yang tumbuh dan bagaimana hasil pembangunan tersebut didistribusikan.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan serta apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan ekonometrika untuk mengetahui pengaruh inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010–2024. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi EViews. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengukur hubungan serta pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$

Keterangan:

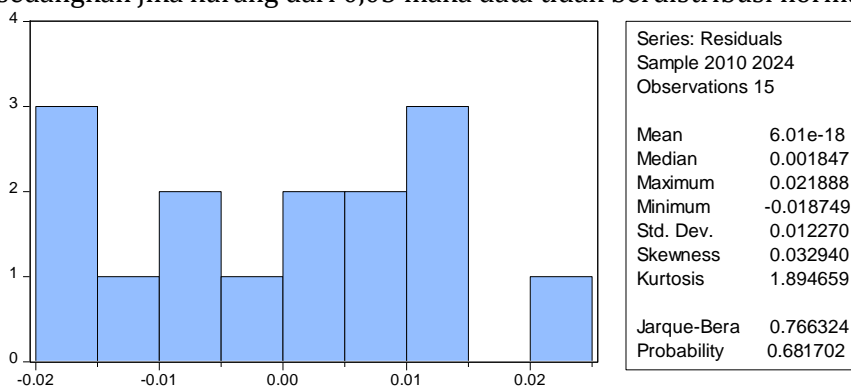
- Y = Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
- α = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien Regresi
- X_1 = Inflasi
- X_2 = PDRB
- e = Error Term

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi EViews. Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, uji multikolinieritas untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen, uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual, serta uji autokorelasi untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji t (parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu, uji F (simultan) untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam model penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian ini penting karena banyak analisis statistik parametrik mensyaratkan data berdistribusi normal. Uji normalitas umumnya dilakukan menggunakan metode seperti Shapiro Wilk atau Kolmogorov Smirnov, dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal, sedangkan jika kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.



Berdasarkan gambar diatas, nilai Probability sebesar 0.681 > 0,05 maka bias dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal atau lolos uji normalitas.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual pada suatu pengamatan dengan residual pada pengamatan lainnya dalam model regresi. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa error pada model bersifat independen sehingga hasil estimasi regresi dapat dianggap valid. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.857720	Prob. F(2,10)	0.4531
Obs*R-squared	2.196383	Prob. Chi-Square(2)	0.3335

Berdasarkan gambar diatas, nilai Obs*R-squared sebesar 0.3335 > 0,05 maka bias disimpulkan bahwa uji asumsi uji autokolerasi sudah terpenuhi atau lolos uji autokolerasi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya memiliki varians residual yang konstan atau tidak terjadi heterokedastisitas sehingga hasil estimasi yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya.

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.265433	Prob. F(2,12)	0.7713
Obs*R-squared	0.635470	Prob. Chi-Square(2)	0.7278
Scaled explained SS	0.181929	Prob. Chi-Square(2)	0.9131

Berdasarkan gambar diatas, nilai Obs*R-squared sebesar 0.7278 > 0,05 maka bias disimpulkan bahwa asumsi uji heterokedastisitas sudaah terpenuhi atau data lolos uji heterokedastisitas.

4. Uji Multikoleneritas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan hubungan yang kuat antar variabel bebas, karena multikolinearitas dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi. Pengujian ini umumnya dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance.

Variance Inflation Factors
 Date: 03/04/26 Time: 11:50
 Sample: 2010 2024
 Included observations: 15

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9.80E-05	8.367192	NA
INF	1.96E-06	4.224924	1.190161
PDRB	4.14E-06	9.549060	1.190161

Berdasarkan gambar diatas, nilai NA sebesar $1.19016 < 10,00$ maka bias dikatakan bahwa asumsi uji multikolinieritas sudah terpenuhi atau lolos uji.

5. Uji T

Uji t merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau melihat nilai signifikansi untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

Dependent Variable: GN
Method: Least Squares
Date: 03/04/26 Time: 11:57
Sample: 2010 2024
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.301661	0.009898	30.47690	0.0000
INF	0.003016	0.001401	2.152993	0.0524
PDRB	0.001860	0.002035	0.913620	0.3789
R-squared	0.411240	Mean dependent var	0.323533	
Adjusted R-squared	0.313114	S.D. dependent var	0.015990	
S.E. of regression	0.013253	Akaike info criterion	5.632377	
Sum squared resid	0.002108	Schwarz criterion	5.490767	
Log likelihood	45.24283	Hannan-Quinn criter.	5.633886	
F-statistic	4.190914	Durbin-Watson stat	1.603116	
Prob(F-statistic)	0.041651			

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pengaruh inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010–2024, dapat disimpulkan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat inflasi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan karena kelompok masyarakat berpendapatan rendah lebih rentan terhadap kenaikan harga dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Sementara itu, variabel PDRB tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Secara simultan, inflasi dan PDRB terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama memiliki peran dalam memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengendalian inflasi serta pemerataan hasil pembangunan agar ketimpangan pendapatan dapat ditekan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara, sehingga kenaikan inflasi cenderung

memperbesar kesenjangan ekonomi masyarakat. Sementara itu, PDRB tidak berpengaruh signifikan secara parsial, yang berarti pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti dengan pemerataan pendapatan. Namun secara simultan, inflasi dan PDRB bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengendalian inflasi dan pemerataan hasil pembangunan agar ketimpangan dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- A., & Febrianti, R. (2023). Analisis determinasi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.
- Badan Pusat Statistik. 2024. Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha 2010–2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2024. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Coibion, O., Gorodnichenko, Y., Kueng, L., & Silvia, J. (2017). Inflation and inequality. *Journal of Monetary Economics*, 91, 1–15.
- Furceri, D., Loungani, P., & Ostry, J. D. (2018). The aggregate and distributional effects of inflation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 50(6), 1309–1334.
- D. N., Adhitya, B., Winarto, H., Kencana, H., & Prabawa, A. (2022). Pengaruh produk domestik regional bruto sektoral terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Pramesti, D. A. D., & Yasa, I. N. M. (2019). Pengaruh investasi dan inflasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Pratama, R. D. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendidikan dan rasio gini terhadap pengangguran terbuka di Kota Sibolga periode 2002–2021. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(02), 193–201.
- Santosa, A. B. (2017). Analisis inflasi di Indonesia. Dalam *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2017*. Stikubank University.
- Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara periode 2015–2019. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 34–43